

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil sangat berpengaruh dan memberikan dampak yang baik terhadap kinerja seorang Pegawai Negeri sipil. Dampak tersebut dapat dilihat di dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) yang dibuat setiap tahunnya melalui dialog kinerja bersama dengan pimpinan serta memiliki target tertentu yang harus dipenuhi dan direalisasikan. Jika dalam kurun waktu satu tahun rencana kinerja baik organisasi maupun individu tidak mencapai atau merealisasikan target yang telah ditentukan maka tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai yang akan diterima oleh Pegawai Negeri Sipil juga akan berkurang.
2. Pemberian tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai bagi Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Trenggalek selama tahun 2022 diatur dengan Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara yang pembayarannya diberikan setiap tiga bulan sekali. Kendala yang dialami Pemerintah Kabupaten Trenggalek dalam melakukan pembayaran tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai dinilai hampir tidak ada atau nihil, tetapi beberapa kendala yang selama ini dirasakan oleh Pegawai Negeri Sipil terkait

keterlambatan pemberian tunjangan tambahan Penghasilan Pegawai bukan berasal dari pemerintah melainkan dari Pegawai Negeri Sipil itu sendiri contohnya seperti, terlambat dalam pengisian SKP yang seharusnya diisi setiap hari tetapi pengisian dilakukan mendekati tanggal jatuh tempo pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai sehingga membuat Pegawai Negeri Sipil terlambat dalam menerima tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai tersebut.

## **B. Saran**

Saran penulis berdasarkan uraian pada bab-bab sebelumnya dan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan saran bahwa:

1. Ketentuan untuk memperoleh tambahan penghasilan pegawai seharusnya diberikan seimbang dengan komposisi prestasi kerja dengan presentase 50% dan disiplin kerja dengan presentase 50% sehingga dapat di seimbangkan antara disiplin kerja dan prestasi kerja.
2. Pada Peraturan Bupati yang mengatur mengenai pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai sebaiknya diberikan tenggang waktu pengisian Sasaran Kinerja Pegawai baik harian, bulanan, maupun tribulan sebelum jatuh tempo pembayaran Tambahan Penghasilan Pegawai.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku:

- Ali, Zainuddin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Disunting oleh Leny Wulandari. Jakarta: Sinar Grafika.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Administrasi Publik: Desentralisasi, Kelembagaan, dan Aparatur Sipil Negara*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dwiyanto, Agus. 2015. *Reformasi Birokrasi Kontrekstual*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Efendi, Jonaedi, dan Johnny Ibrahim. 2018. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris (Edisi Pertama)*. Depok: Penerbit Prenadamedia Group.
- Hartini, Sri, dan Tedi Sudrajat. 2019. *HUKUM KEPEGAWAIAN DI INDONESIA (EDISI KEDUA)*. Disunting oleh Tamzi. Jakarta: Sinar Grafika.
- Miftah, Toha. 2016. *Manajemen Kepegawaian Sipil di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Sinambela, Lijan Poltak. 2012. *Kinerja Pegawai: Teori, Pengukuran, dan Implikasi*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Wibawa, Samodra. 2011. *Politik Perumusan Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Winarno, Bambang. 2018. *Kamus Kepegawaian Republik Indonesia*. Bogor: Garuda Mas Sejahtera.
- Yusriadi. 2018. *Reformasi Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Deepublish.

### Skripsi:

- Afdalul, Zikri. 2018. "Pemberian Tunjangan Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Pada Dinas Kesehatan Kota Bukittinggi (Studi Pada Puskesmas Nilam Sari Kota Bukittinggi)." *Fakultas Hukum Universitas Andalas* (Skripsi).
- Muninggar, Sukma Ayu Dewi. 2022. "Pemenuhan Asas Kesejahteraan Dalam Kebijakan Sistem Penggajian Pegawai Negeri Sipil Provinsi DKI Jakarta Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara." *Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta* (Skripsi).

Pakihi, Maulya Naifah Mustakim. 2020. "Pengaruh Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Terhadap Kinerja Pegawai di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Jeneponto." *Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar* (Skripsi).

### **Jurnal:**

Hasibuan, Jasman Saripuddin. 2019. " Pengaruh Disiplin Kerja dan Motivasi Terhadap Kinerja Karyawan." *Semnas Multidisiplin Ilmu Inovasi Produk Penelitian Pengabdian Masyarakat & Tantangan Era Revolusi Industri 4.0* (Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Serambi Mekkah Banda Aceh) 2: 134-147.

Ihsan, Nur. 2017. "Evaluasi Implementasi Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil." *Jurnal Ilmu Administrasi Negara* (Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik) 2: 161-166.

Kamilasari, Wiwin Nur, dan Triesninda Pahlevi. 2021. "Penerapan Sistem Penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) di Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Kantor Pemerintah Kabupaten Bojonegoro." *Jurnal Sains Sosio Humaniora* 503-509.

Maksin, Mastina, Revanggi Ayu Tantri, Sahrul Hidayat, and Aprillio Egy Ariyanto. 2022. "Pelaksanaan Program "ASN Ber-Akhlak" Sebagai Bentuk Pengembangan Pegawai Untuk Meningkatkan Kualitas dan Loyalitas Pegawai." *Restorica: Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara dan Ilmu Komunikasi* 8: 27-34.

Watugandha, Financia Emilia. 2022. "Peran Widyaiswara Dalam Menerapkan Nilai-Nilai Dasar ASN Ber-Akhlak Pada BPSDM Provinsi Papua." *JurnalProHukum: Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik* (Fakultas Hukum Universitas Gresik) 11: 281-291.

### **Peraturan Perundang Undangan:**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-pokok Kepegawaian. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169. Sekretariat Negara. Jakarta.

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai negeri Sipil. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77. Sekretariat Negara. Jakarta.
- Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-4700 Tahun 2020 tentang Tata Cara Persetujuan Menteri Dalam Negeri Terhadap Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara. Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negeran dan Reformasi Birokrasi. Jakarta.
- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Cores Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara.
- Peraturan Daerah Kabupaten Trenggalek Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah. Lembaran Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 16. Sekretariat Daerah. Trenggalek.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 35 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah. Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2016 Nomor 35. Sekretariat Daerah. Trenggalek.
- Peraturan Bupati Trenggalek Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi Aparatur Sipil Negara. Berita Daerah Kabupaten Trenggalek Tahun 2022 Nomor 5. Sekretariat Daerah. Trenggalek.
- Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/293/406.001.3/2022 tentang Mekanisme Penilaian Kinerja dan Format Penilaian Kinerja Aparatur Sipil Negara.

Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/296/406.001.3/2022 tentang Penetapan Kriteria Pemberian dan Besaran Tambahan Penghasilan Aparatur Sipil negara Pada Pemerintah Kabupaten Trenggalek.

Keputusan Bupati Trenggalek Nomor: 188.45/490/406.001.3/2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2022.

**Website:**

*ASN sampai Nangis-nangis agar Tambahan Penghasilan Tak Dihapus tapi Bupati Pamekasan Bergeming*. 13 Januari 2022.  
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/13/075235878/asn-sampai-nangis-nangis-agar-tambahan-penghasilan-tak-dihapus-tapi-bupati?page=all> (diakses Oktober 30, 2022).

*Bupati Pamekasan Dilaporkan ke Polda Jatim karena Hapus Tambahan Penghasilan ASN*. Januari 12, 2022.  
<https://surabaya.kompas.com/read/2022/01/12/204018278/bupati-pamekasan-dilaporkan-ke-polda-jatim-karena-hapus-tambahan?page=all> (accessed November 4, 2022).

*Disdukcapil Kabupaten Trenggalek*. <https://dukcapil.trenggalekkab.go.id> (diakses Oktober 30, 2022).

*Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 Bahas Penilaian Kinerja PNS*. 4 Februari 2022.  
<http://sulawesi.gakkum.menlhk.go.id/index.php/2022/02/04/peraturan-pemerintah-nomor-30-tahun-2019-bahas-penilaian-kinerja-pns/> (diakses Oktober 31, 2022).

*Ricuh TPP dan Carut Marut Filosofi Birokrasi*. Maret 16, 2022.  
<https://birokratmenulis.org/ricuh-tpp-dan-carut-marut-filosofi-birokrasi/> (accessed November 4, 2022).

*Sri Mulyani Kesal Anggaran Pemda Habis untuk Gaji PNS*. Juni 16, 2022.  
<https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20220616194909-532-809955/sri-mulyani-kesal-anggaran-pemda-habis-untuk-gaji-pns> (accessed November 4, 2022).